

BAB III

OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, yang menjadi objek penelitian adalah Pemerintah Kota Bandung dalam mengelola dan mendistribusikan retribusi daerah. Dan penulis juga meneliti fungsi Inspektorat dalam menunjang peningkatan pendapatan retribusi daerah yang dihasilkan oleh pemerintah kota Bandung. Pemerintah kota Bandung yang berlokasi di Jalan Wastukencana No.2 kota Bandung merupakan alat kontrol dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berbentuk badan.

3.1.1 Sejarah Singkat Inspektorat

Tujuan pokok diberikannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang Nomor 33. Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola dan mengurus daerahnya sendiri (otonom), tindak lanjut dari pemberlakuan Undang-undang tersebut diterbitkannya peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom. Pada lingkup Pemerintah Kota Bandung diterbitkan peraturan daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang pedoman tata cara pengawas atas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaan dibentuk suatu badan yang merupakan unsur penunjang pemerintah daerah dibidang pengawasan, yaitu Inspektorat Kota Bandung sebagaimana tertuang dalam peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang pembentukan dan susunan organisasi Inspektorat Kota Bandung. Di dalam pelaksanaan kerjanya, Inspektorat Kota Bandung mengacu kepada keputusan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2004 tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi dan tata kerja Inspektorat Kota Bandung.

Seiring dengan berjalannya pemerintahan di kota Bandung, Inspektorat telah mengalami beberapa perubahan/perkembangan nama , yaitu :

- 1) Inspektorat Wilayah (ITWIL) Kota Bandung. Sesuai dengan SK Walikota KDH TK II Bandung Nomor 2876/1972, tanggal 18 Februari 1976
- 2) Badan Pengawasan Daerah (BAWASDA) Kota Bandung. Sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2004
- 3) Inspektorat Kota Bandung. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2007

Visi dan Misi Inspektorat

Visi Inspektorat :

Visi Inspektorat Kota Bandung adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bermartabat melalui pengawasan yang profesional dan bertanggungjawab.

Misi Inspektorat :

- 1) Melakukan pengawasan terhadap sistem, mekanisme, peraturan yang telah ditetapkan
- 2) Mendorong dan memberikan kontribusi bagi terselenggaranya pemerintahan yang baik melalui pengawasan internal/fungsional
- 3) Mendorong terwujudnya aparat pemerintah yang profesional, akuntabel, efektif dan efisien serta responsif
- 4) Meningkatkan kualitas hasil pengawasan dalam pengambilan keputusan pimpinan untuk peningkatan kinerja aparat pemerintah
- 5) Menumbuhkan sinergi antar aparat pemerintah

Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Inspektorat

Berdasarkan surat keputusan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2004 tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi dan tata kerja Inspektorat Kota Bandung. Inspektorat adalah lembaga teknis daerah yang berbentuk badan, merupakan unsur penunjang pemerintah daerah di bidang pengawasan yang dipimpin oleh seorang kepala badan/Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administratif

mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengawasan. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

- 1) Inspektur
- 2) Sekretariat, membawahi :
 - (1) Sub. Bagian Perencanaan
 - (2) Sub. Bagian Evaluasi dan Pelaporan
 - (3) Sub. Bagian Administrasi dan Umum
- 3) Inspektur Pembantu Wilayah I :
 - (1) Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pembangunan Wilayah I
 - (2) Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Wilayah I
 - (3) Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Kemasyarakatan Wilayah I
- 4) Inspektur Pembantu Wilayah II :
 - (1) Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pembangunan Wilayah II
 - (2) Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Wilayah II
 - (3) Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Kemasyarakatan Wilayah II
- 5) Inspektorat Pembantu Wilayah III :
 - (1) Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pembangunan Wilayah III
 - (2) Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Wilayah III
 - (3) Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Kemasyarakatan Wilayah III
- 6) Inspektur Pembantu Wilayah IV :
 - (1) Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pembangunan Wilayah IV
 - (2) Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Wilayah IV
 - (3) Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Kemasyarakatan Wilayah IV
- 7) Kelompok Jabatan fungsional

Kelompok jabatan fungsional pada Inspektorat daerah terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diangkat oleh Walikota atas usul Inspektur. Pembentukan jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional

ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Wilayah yang diperiksa sesuai dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibagi menjadi 4 wilayah meliputi :

1) Wilayah I – Wilayah Dago, terdiri dari :

- (1) Dinas Bina Marga dan Pengairan
- (2) Dinas Perhubungan
- (3) Dinas Kebakaran
- (4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- (5) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
- (6) Badan Kepegawaian Daerah
- (7) Satuan Polisi Pamong Praja
- (8) Rumah Sakit Umum Daerah
- (9) Perusahaan Daerah Pasar bermartabat
- (10) Bagian Pemerintahan Umum
- (11) Bagian Keuangan
- (12) Kecamatan Sukasari
- (13) Kecamatan Sukajadi
- (14) Kecamatan Cicendo
- (15) Kecamatan Andir
- (16) Kecamatan Cidadap
- (17) Kecamatan Coblong
- (18) Kecamatan Bandung Wetan
- (19) Kecamatan Cibeunying Kaler

2) Wilayah II – Wilayah Sumur Bandung, terdiri dari :

- (1) Asisten Pemerintahan
- (2) Dinas Pendapatan
- (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- (4) Dinas Pendidikan
- (5) Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya

- 
- (6) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
 - (7) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
 - (8) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat
 - (9) Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak
 - (10) Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah
 - (11) Bagian Pengelolaan Asset
 - (12) Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam
 - (13) Kecamatan Cibeunying Kidul
 - (14) Kecamatan Sumur Bandung
 - (15) Kecamatan Batununggal
 - (16) Kecamatan Regol
 - (17) Kecamatan Lengkong
 - (18) Kecamatan Kiaracondong
 - (19) Kecamatan Antapani
- 3) Wilayah III – Wilayah Buah Batu, terdiri dari :
- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - (2) Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan
 - (3) Dinas Sosial
 - (4) Dinas Kesehatan
 - (5) Dinas Pertanian
 - (6) Badan Pengelola Lingkungan Hidup
 - (7) Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - (8) Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut
 - (9) Perusahaan Daerah Kebersihan
 - (10) Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - (11) Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
 - (12) Bagian Umum dan Perlengkapan
 - (13) Kecamatan Bandung Kulon
 - (14) Kecamatan Bojongloa Kaler

- (15) Kecamatan Babakan Ciparay
- (16) Kecamatan Bojongloa Kidul
- (17) Kecamatan Astana Anyar
- (18) Kecamatan Bandung Kidul
- (19) Kecamatan Buah Batu

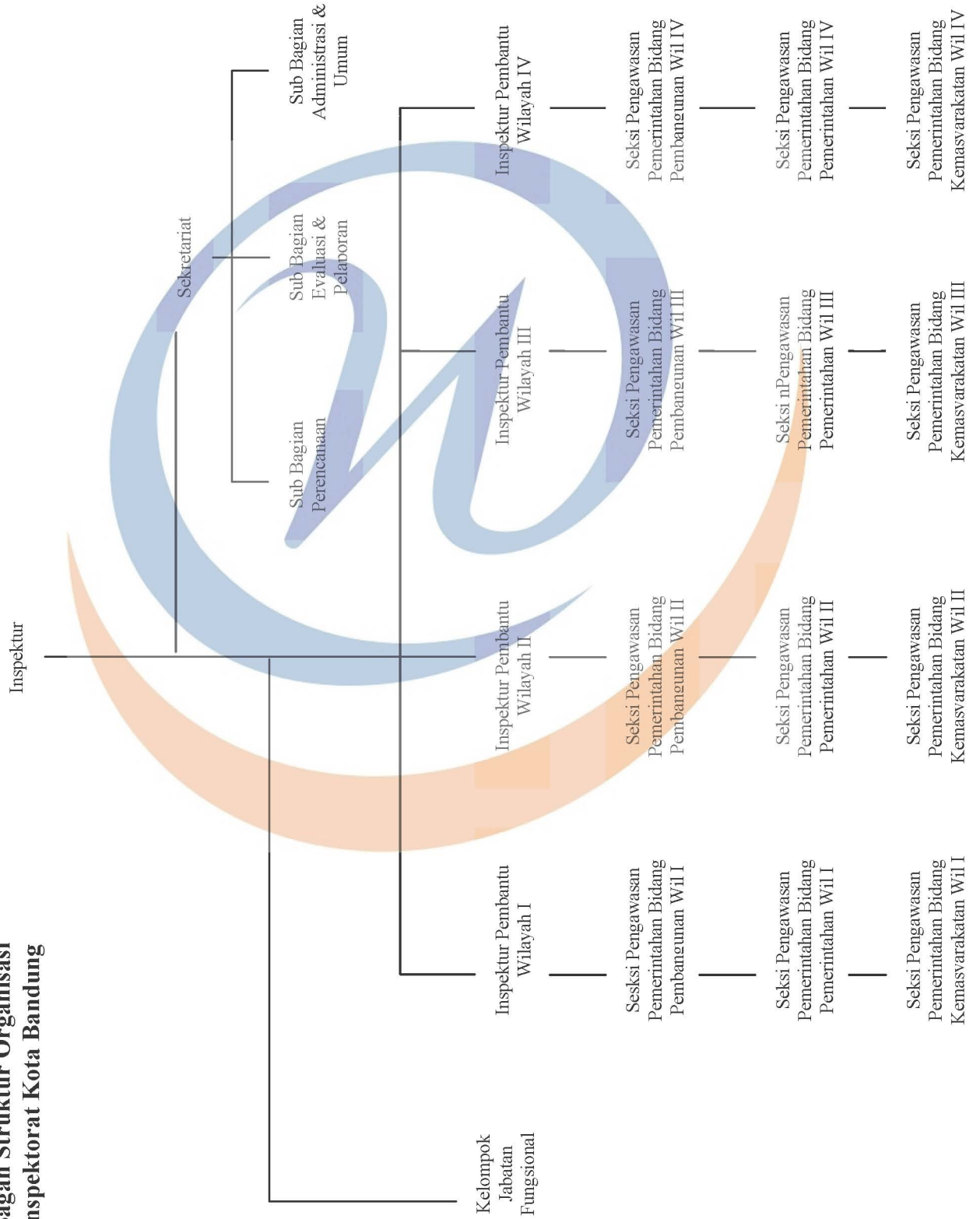
4) Wilayah IV – Wilayah Metro, terdiri dari :

- (1) Asisten administrasi Umum
- (2) Dinas Tenaga Kerja
- (3) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
Perdagangan
- (4) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- (5) Dinas Pertamanan
- (6) Badan Komunikasi dan Informatika
- (7) Kantor Pengelola Pemakaman
- (8) Perusahaan Daerah Air Minum
- (9) Bagian Perekonomian
- (10) Bagian Ketahanan Pangan
- (11) Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah
- (12) Kecamatan Rancasari
- (13) Kecamatan Panyileukan
- (14) Kecamatan Gedebage
- (15) Kecamatan Cibiru
- (16) Kecamatan Ujungberung
- (17) Kecamatan Mandalajati
- (18) Kecamatan Cinambo
- (19) Kecamatan Arcamanik

5) Jumlah Tenaga

Inspektorat Kota Bandung terdiri dari 64 (enam puluh empat) orang karyawan yang terdiri dari 1 (satu) orang eselon II B, 5 (lima) orang eselon

**Bagan Struktur Organisasi
Inspektorat Kota Bandung**



III A, 15 (lima belas) orang eselon IV A, 9 (sembilan) orang Auditor dengan klasifikasi 8 (delapan) orang Auditor ahli Madya dan 1 (satu) Auditor Muda, dan pelaksana sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang.

Di dalam struktur organisasi tersebut setiap pejabat atau staf mempunyai tugas masing-masing sesuai dengan bidangnya, tugas tersebut yaitu :

1) Kepala Badan/Inspektur

Kepala Badan/Inspektur mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan badan dalam mengelola urusan rumah tangga daerah, melaksanakan kebijakan Walikota di bidang pengawasan umum terhadap penyelenggaraan, pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di lingkungan pemerintah Kepala Badan/Inspektur mempunyai tugas sebagai berikut :

- (1) Menyusun rencana strategis dan program kerja tahunan Inspektorat sesuai dengan program pembangunan daerah (properda)
- (2) Memberi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas agar tercipta pemerataan tugas
- (3) Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kejelasan pelaksanaan tugas
- (4) Membantu dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan agar tidak terjadi penyimpangan
- (5) Memeriksa hasil bawahan untuk mengetahui kesulitan dan hambatan serta memberikan jalan keluarnya
- (6) Menilai hasil kerja bawahan secara periodik guna bahan peningkatan kinerja
- (7) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas
- (8) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
- (9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

2) Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan/Inspektur dalam melaksanakan urusan perencanaan kegiatan, evaluasi dan pelaporan serta urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan serta kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan/Inspektur.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (1) Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan
- (2) Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencanadan program kerja pengawasan
- (3) Pelaksanaan penghimpunan, pengelolaan, penilaian, dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah
- (4) Pelaksanaan penyusunan bahan/data pembinaan teknis fungsional
- (5) Pelaksanaan penginventarisasian, penyusunan dan pengkoordinasian proses penanganan pengaduan
- (6) Pelaksanaan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan
- (7) Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Inspektorat
- (8) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan kesekretariatan

3) Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam bidang perencanaan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi :

- (1) Penyiapan bahan penyusunan dan pengendalian rencana atau program kerja pengawasan
- (2) Penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan

- (3) Penyiapan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan
- (4) Penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan
- (5) Penyusunan anggaran Inspektorat
- (6) Pelaporan kegiatan perencanaan

4) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam bidang evaluasi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- (1) Pelaksanaan inventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan
- (2) Pelaksanaan pengadministrasian laporan hasil pengawasan
- (3) Pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan
- (4) Pelaksanaan penyusunan laporan hasil pengawasan
- (5) Penyusunan statistik hasil pengawasan
- (6) Penyelenggaraan kerjasama pengawasan
- (7) Pelaporan kegiatan evaluasi dan pelaporan

5) Sub Bagian Administrasi dan Umum

Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris di bidang administrasi dan umum. Untuk melaksanakan tugas pokoknya Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai fungsi :

- (1) Pelaksanaan pengelolaan administrasi meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas
- (2) Pengelolaan urusan kepegawaian yang meliputi penyiapan bahan dan penyusunan rencana mutasi, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai

- (3) Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan
- (4) Pelaporan kegiatan di bidang administrasi dan umum

6) Inspektur Pembantu

Inspektur Pembantu mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan urusan pemerintahan dan kasus pengaduan di instansi atau satuan kerja perangkat daerah sesuai wilayah kerjanya masing-masing.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Inspektur Pembantu mempunyai fungsi :

- (1) Pengusulan program pengawasan di wilayah kerjanya
- (2) Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah kerjanya
- (3) Pelaksanaan tugas pengawasan meliputi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian
- (4) Pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan
- (5) Pelaporan pelaksanaan hasil pengawasan

7) Seksi Pengawasan Pembangunan

Seksi Pengawasan Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Inspektur Pembantu dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang pembangunan sesuai wilayah kerjanya.

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya Seksi Pengawasan Pembangunan mempunyai fungsi :

- (1) Pengusulan program pengawasan bidang pembangunan
- (2) Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang pembangunan
- (3) Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pembangunan
- (4) Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan di bidang pembangunan
- (5) Pelaporan pelaksanaan hasil pengawasan bidang pembangunan

8) Seksi Pengawasan Pemerintahan

Seksi Pengawasan Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Inspektur Pembantu dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang pemerintahan sesuai wilayah kerjanya.

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya Seksi Pengawasan Pemerintahan mempunyai fungsi :

- (1) Pengusulan program pengawasan bidang pemerintahan
- (2) Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang pemerintahan
- (3) Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pemerintahan
- (4) Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan di bidang pemerintahan
- (5) Pelaporan pelaksanaan hasil pengawasan bidang pemerintahan

9) Seksi Pengawasan Kemasyarakatan

Seksi Pengawasan Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok membantu Inspektur Pembantu dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang kemasyarakatan sesuai wilayah kerjanya.

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya Seksi Pengawasan Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- (1) Pengusulan program pengawasan bidang kemasyarakatan
- (2) Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang kemasyarakatan
- (3) Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kemasyarakatan
- (4) Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan di bidang kemasyarakatan
- (5) Pelaporan pelaksanaan hasil pengawasan bidang kemasyarakatan

Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif.

Indriantoro dan Supomo (2002:26) menyatakan bahwa :

“Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi”.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan sistematis, aktual dan akurat dengan cara mengumpulkan data berdasarkan fakta yang nampak dalam organisasi, dimana fakta tersebut dikumpulkan, diolah, dan dianalisis, sehingga dapat memberikan saran-saran untuk masa yang akan datang.

3.2.1 Penentuan Responden

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian studi kasus yaitu dilakukan pada Inspektorat Kota Bandung, unit analisis dalam penelitian ini adalah individu yang berkaitan dengan “Fungsi Inspektorat Dalam Melaksanakan Audit Untuk Menunjang Peningkatan Retribusi Daerah Pada Pemerintah Kota Bandung”. Individu-individu yang terkait yaitu sebagian dari jumlah keseluruhan staf dan pejabat pada Inspektorat yang berjumlah 68 orang. Dari sejumlah responden tersebut yang didapat untuk mengisi kuisisioner adalah 20 orang dari Inspektorat Kota Bandung dan 10 orang dari Dinas Pendapatan Kota Bandung. Alasan penentuan kriteria responden adalah karena responden yang berdasarkan kriteria tersebut penulis anggap sebagai orang yang paling kompeten untuk menjawab kuisisioner yang penulis ajukan.

3.2.2 Definisi Variabel

Menurut **Sugiyono (2004:31)**, definisi variable penelitian adalah sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

Untuk menjawab dan mengungkapkan masalah serta tujuan penelitian, perlu dikemukakan terlebih dahulu variable-variabel yang terkandung dalam penelitian ini. Penelitian dengan judul “Fungsi Inspektorat Dalam Melaksanakan Audit Untuk Menunjang Peningkatan Retribusi Daerah Pada Pemerintah Kota Bandung”, studi kasus pada Inspektorat Kota Bandung. Terdapat dua variabel dalam penelitian ini, yaitu variabel bebas (independent variable) dan variabel terikat (dependent variable).

Secara rinci pengertian kedua variabel tersebut diuraikan sebagai berikut :

- 1) Variabel bebas (independent variable), yaitu variable yang dapat berpengaruh atau mempengaruhi variabel lainnya, dalam hal ini variabel bebas adalah Fungsi Inspektorat
 - 2) Variabel terikat (dependent variable), yaitu merupakan variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel bebas, dalam hal ini variabel terikat adalah Pendapatan Retribusi Pemerintah Kota Bandung
- Antara variabel independent dan variabel dependent, masing-masing tidak berdiri sendiri tetapi saling berkaitan

3.2.3 Sumber Data Penelitian

Sebagian besar tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang relevan, dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dari dua sumber, yaitu :

- 1) Data Premir

Data premir ini merupakan data yang diperoleh langsung dari Inspektorat dan Pemerintah Kota Bandung. Dimana penelitian yang dilakukan penulis adalah dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pejabat dan staf yang ada di Inspektorat dan Pemerintah Kota Bandung

- 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang secara tidak langsung dapat dijadikan sebagai sumber informasi, dalam data sekunder ini dapat penulis peroleh

dari studi perpustakaan dan pengumpulan data dari literatur-literatur serta dari sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti

3.2.4 Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam menyusun skripsi ini diperoleh dengan cara :

1) Penelitian Lapangan (field research)

Yaitu pengumpulan data secara langsung dengan mengadakan penelitian terhadap objek yang diteliti untuk memperoleh data primer, dengan melakukan :

- (1) Observasi, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati langsung keadaan Pemerintah kota Bandung yang menjadi objek penelitian
- (2) Wawancara, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara komunikasi langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu melakukan wawancara dengan pejabat dan staf di bidang Pemeriksaan Perekonomian Pembangunan dan Bagian tata Usaha yang berada pada Inspektorat dan wawancara dengan pejabat dan staf di bidang Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bandung, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu mengenai masalah-masalah yang akan diteliti
- (3) Kuisisioner, yaitu berupa formulir pernyataan-pernyataan tertulis dimulai dari pendapat selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah, dan tidak tahu yang diajukan kepada responden yang terlibat atas penelitian, dengan perhitungan persentase yang menunjukkan fungsi Inspektorat.

2) Penelitian Kepustakaan (library research)

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh landasan teori guna mendukung data primer yang diperoleh selama penelitian dari buku-buku serta referensi lainnya

3.2.5 Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variable adalah gambaran-gambaran yang jelas mengenai objek yang akan diteliti dimana data yang diperoleh dikumpulkan dan dianalisis kemudian dibandingkan dengan landasan teoritis yang diperoleh dari literature.

Adapun pengertian variable menurut **sugiyono (2004:31)** adalah :

“Variabel penelitian pada dasarnya adalah sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.”

Skala pengukuran yang diambil dalam penelitian ini adalah skala ordinal. Skala ordinal ini memungkinkan penelitian untuk mengurutkan responden ke dalam urutan rangking atas dasar hidupnya terhadap masalah tertentu. Adapun indikasi variabel dan instrument yang digunakan dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel, Indikator,
Sub Indikator, dan Instrumen

Operasionalisasi Variabel	Indikator	Sub Indikator	Instrumen
Variabel Bebas Fungsi Inspektorat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan 2. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengawasan daerah 3. Pelaksanaan pengelolaan bidang administrasi, kepegawaian, perencanaan, evaluasi dari pelaporan 4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota 	<p>Menilai ketaatan kebijakan, rencana, dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan</p> <p>Meneliti dan menilai pelaksanaan pemeriksa pemerintah pemerintah aparat, perekonomian dan kekayaan serta kesejahteraan sosial</p> <p>Meneliti dan menilai pelaksanaan keuangan, akuntansi, dan operasi</p> <p>Menilai mutu atas pelaksanaan dari masing-masing tugas yang diberikan pada masing-masing anggota manajemen pemerintah</p>	Observasi, wawancara, kuisisioner
Variabel Terikat Pendapatan Retribusi Pemerintah Kota Bandung	Kenaikan Pendapatan Retribusi Pemerintah Kota Bandung	Target dan realisi pendapatan Pemerintah Kota Bandung	Observasi, wawancara, kuisisioner

3.2.6 Analisis Data dan Rancangan Pengujian Hipotesis

3.2.6.1 Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah diinterpretasikan. Data yang terhimpun dari hasil penelitian akan penulis bandingkan antara data yang ada dilapangan dengan data kepustakaan, kemudian dilakukan analisis untuk menarik kesimpulan.

Teknik pengukuran yang penulis gunakan adalah skala likert. Menurut **Sugiyono (2004:86)**, skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapatan, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Alternatif jawaban setiap instrument yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari yang sangat positif sampai sangat negatif. Adapun masing-masing alternatif jawaban nilainya ditentukan sebagai berikut :

- 1) Jawaban “selalu” memiliki nilai = 5
- 2) Jawaban “sering” memiliki nilai = 4
- 3) Jawaban “kadang-kadang” memiliki nilai = 3
- 4) Jawaban “tidak pernah” memiliki nilai = 2
- 5) Jawaban “tidak tahu” memiliki nilai = 1

Untuk menilai variable X dan Y maka analisis yang digunakan adalah dengan mengalikan antara jumlah responden dengan nilai alternatif jawaban yang dipilih dan jumlah pertanyaan, kemudian dihitung seberapa besar persentasinya terhadap nilai tertinggi.

Setelah mendapatkan persentasi dari masing-masing variable kemudian dibandingkan dengan kriteria yang penulis tentukan berdasarkan nilai yang penulis tentukan berdasarkan nilai yang paling rendah dan nilai yang paling tinggi dari kuisisioner. Nilai tersebut masing- masing penulis ambil dari skor dikali dengan jumlah responden dikali lagi dengan jumlah pertanyaan.

Untuk Variabel X dan Y, jumlah responden yang diteliti sebanyak 30 orang dan jumlah pertanyaan masing-masing sebanyak 10 buah, maka :

- 1) Nilai terendah sebanyak $1 \times 30 \times 10 = 300 : 1500 = 0,2 \times 100\% = 20\%$
- 2) Nilai tertinggi sebanyak $5 \times 30 \times 10 = 1500 : 1500 = 1 \times 100\% = 100\%$

3) Nilai tiap batas sebanyak $100\% - 30\% = 70\% : 5 = 14\%$, nilai tiap batas tersebut kemudian ditambahkan dengan nilai terendah dan nilai tertinggi Atas dasar nilai terendah dan tertinggi tersebut maka kriteria untuk menilai variable X, penulis tentukan sebagai berikut :

1) Skor 20 % - 35 %

Mengindikasikan bahwa Inspektorat tidak berfungsi dalam menentukan penyelenggaraan pemerintah di bidang pengawasan

2) Skor 36 % - 51 %

Mengindikasikan bahwa Inspektorat kurang berfungsi dalam menentukan penyelenggaraan pemerintah di bidang pengawasan

3) Skor 52 % - 67 %

Mengindikasikan bahwa Inspektorat cukup berfungsi dalam menentukan penyelenggaraan pemerintah di bidang pengawasan

4) Skor 68 % - 83 %

Mengindikasikan bahwa Inspektorat berfungsi dalam menentukan penyelenggaraan pemerintah di bidang pengawasan

5) Skor 84 % - 100 %

Mengindikasikan bahwa Inspektorat sangat berfungsi dalam menentukan penyelenggaraan pengawasan pemerintah di bidang pengawasan

Atas dasar nilai terendah dan nilai tertinggi tersebut maka kriteria menilai variabel Y, penulis tentukan sebagai berikut :

1) Skor 20 % - 35 %

Mengindikasikan bahwa pendapatan retribusi pada Pemerintah Kota Bandung tidak tercapai

2) Skor 36 % - 51 %

Mengindikasikan bahwa pendapatan retribusi pada Pemerintah Kota Bandung kurang tercapai

3) Skor 52 % - 67 %

Mengindikasikan bahwa pendapatan retribusi pada Pemerintah Kota Bandung cukup tercapai

4) Skor 68 % - 83 %

Mengindikasikan bahwa pendapatan retribusi pada Pemerintah Kota Bandung tercapai

5) Skor 84 % - 100 %

Mengindikasikan bahwa pendapatan retribusi pada Pemerintah kota Bandung sangat tercapai

3.2.6.2 Rancangan pengujian Hipotesis

Untuk mengetahui sejauh mana Fungsi Inspektorat Dalam Melaksanakan Audit Untuk Menunjang Peningkatan Retribusi Daerah Pada Pemerintah Kota Bandung maka digunakan pengujian hipotesis.

Rancangan pengujian hipotesis digunakan untuk mengetahui kolerasi dari kedua variable yang diteliti, dalam hal ini adalah kolerasi antara fungsi Inspektorat dengan pendapatan retribusi daerah, dengan menggunakan perhitungan statistik.

Langkah-langkah dalam pengujian hipotesis ini akan dimulai dengan menetapkan hipotesis alternatif, pemilihan tes statistik, pendapatan tingkat signifikansi, dan penetapan kriteria pengujian.

Adapun penjelasan dari langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut :

1) Penetapan hipotesis nol dan hipotesis alternatif

Penetapan hipotesis nol (H_0) dan penetapan hipotesis alternatif (H_a) digunakan dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara dua variable tersebut. Hipotesis penelitian yang diajukan adalah hipotesis alternatif (H_a), sedangkan untuk keperluan analisis statistik hipotesisnya berpasangan antara hipotesis nol (H_0) dengan hipotesis alternatif (H_a). Sehingga penulis dapat menguraikan ke dalam bentuk hipotesis kerja menjadi sebagai berikut :

H_0 : Fungsi Inspektorat tidak dapat meningkatkan Pendapatan Retribusi Daerah Pada Pemerintah Kota Bandung.

H_a : Fungsi Inspektorat dapat meningkatkan Pendapatan Retribusi Daerah Pada Pemerintah Kota Bandung.

2) Pemilihan test statistik

Pengujian hipotesis nol (H_0) dengan menggunakan statistik non parametrik sangat sesuai dengan data-data ilmu sosial dan dapat digunakan bukan untuk skor eksak dalam pengertian keangkaan, melainkan semata-mata merupakan tingkatan atau *rank* serta sesuai dengan sampel yang kecil. Dari beberapa teknik pengujian hipotesis nonparametrik yang ada, untuk penelitian ini penulis menggunakan koefisien korelasi *Rank Spearman*, dengan alasan menggunakan teknik pengujian ini merupakan ukuran asosiasi yang menuntuk kedua variabel diukur sekurangnya dalam skala ordinal sehingga objek atau individu-individu yang dipelajari dapat diranking dalam dua rangkaian berturut-turut. Data yang diperoleh dikumpulkan melalui kuisisioner dalam bentuk pertanyaan tertutup dan masing-masing memiliki skor tersendiri. Skala yang digunakan untuk mengukur variabel X dan variabel Y adalah skala ordinal atau skala urutan, yaitu skala yang dipakai jika terdapat hubungan, biasanya berbeda diantara kelas-kelas dan ditandai dengan (>) yang artinya “lebih besar dari pada”.

Hipotesis ini diuji dengan menggunakan analisis korelasi *Rank Spearman*, dengan rumus sebagai berikut :

$$P = 1 - \frac{6 \sum b_i^2}{n(n^2 - 1)}$$

Dimana : P = koefisien korelasi *Rank Spearman*

$b_i = X_i - Y_i$

n = Jumlah responden

3) Penetapan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi adalah tingkat probabilitas kesalahan yang ditentukan oleh peneliti untuk membuat keputusan menolak atau mendukung hipotesis. Tingkat signifikansi yang dipilih dalam penelitian adalah 5 % ($\alpha = 0,05$) karena nilai X dapat mewakili hubungan antara dua variabel dan merupakan tingkat signifikansi yang umumnya digunakan

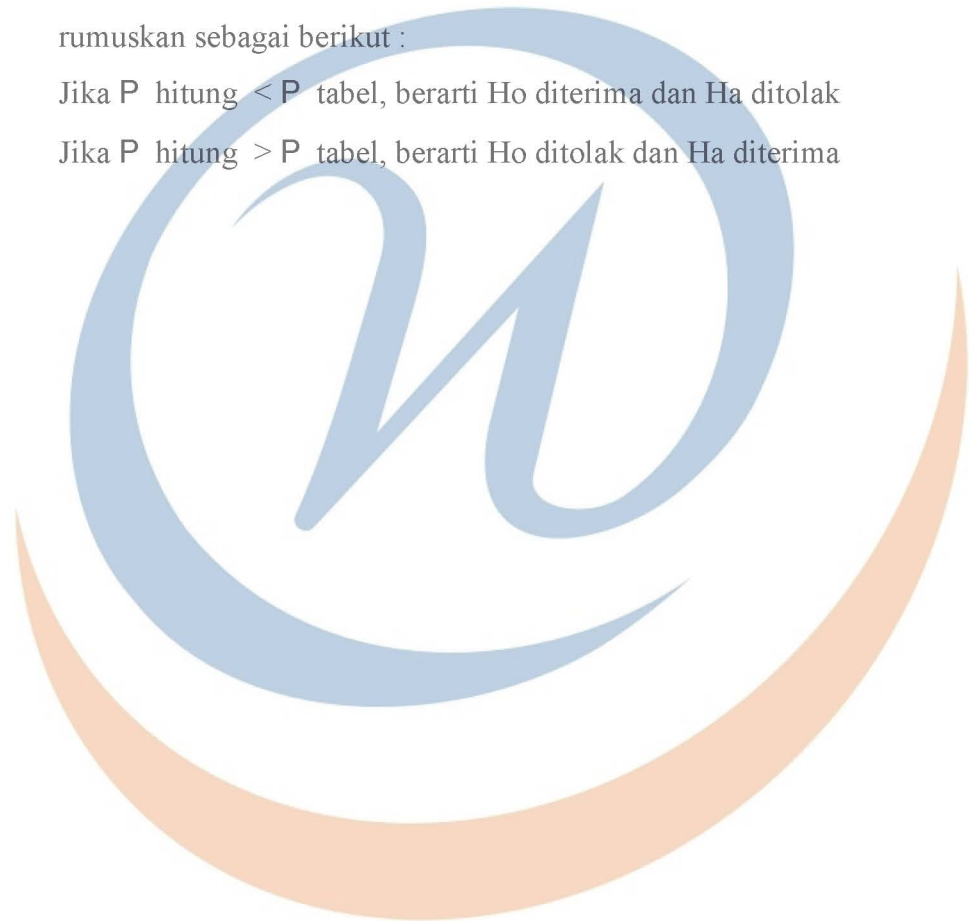
untuk penelitian bidang ilmu-ilmu sosial. kriteria keputusan berdasarkan tingkat signifikansi sebesar 5 % menunjukkan bahwa keputusan yang dibuat peneliti untuk menolak atau mendukung hipotesis mempunyai probabilitas kesalahan sebesar 5 %

4) Penetapan kriteria pengujian

Setelah dimasukkan kedalam persamaan korelasi *Rank Spearman*, kemudian dilakukan pengujian dengan menggunakan kriteria ditetapkan yaitu dengan membandingkan nilai *P hitung* dengan *P tabel* yang penulis rumuskan sebagai berikut :

Jika $P_{hitung} < P_{tabel}$, berarti H_0 diterima dan H_a ditolak

Jika $P_{hitung} > P_{tabel}$, berarti H_0 ditolak dan H_a diterima



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang Fungsi Inspektorat Dalam Menunjang Peningkatan Retribusi Daerah Pada Pemerintah Kota Bandung diperoleh data sebagai berikut.

4.1.1 Fungsi Inspektorat pada Program Pemeriksaan

1) Pembicaraan Pendahuluan dengan Pimpinan Objek yang Diperiksa

Pembicaraan pendahuluan dilakukan oleh pemeriksa dengan pimpinan/kepala unit kerja objek yang diperiksa.

- (1) Memberikan secara resmi akan dilakukannya pemeriksaan pada objek-objek yang diperiksa
- (2) Memberikan gambaran yang tepat kepada pimpinan objek pemeriksaan yang akan diperiksa tentang pengertian pemeriksaan dan manfaat yang dapat diperoleh dari pemeriksaan tersebut
- (3) Mengemukakan sasaran pemeriksaan yang akan dilakukan sesuai dengan surat tugas

2) Pengujian Terbatas Terhadap Sistem Pengendalian Manajemen

Sistem pengendalian manajemen mencakup seluruh sistem organisasi, kebijakan, prosedur, personalia, perencanaan, akuntansi, pelaporan, dan pemeriksaan internal yang ditetapkan oleh pimpinan dalam mengelola suatu satuan kerja serta melaksanakan tanggungjawabnya secara efektif untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan. Tujuan dari pengujian sistem pengendalian manajemen adalah untuk menilai tingkat efisiensi, efektivitas, dan ekonomi serta mengetahui kemungkinan adanya kelemahan pengendalian manajemen dari kegiatan program yang diperiksa.

Cara pendekatan untuk mengidentifikasi bagian penting dari sistem pengendalian manajemen, yaitu :

- (1) Menelusuri beberapa kegiatan tertentu dari awal sampai akhir dengan cara mengamati secara langsung tindakan-tindakan, langkah-langkah, serta proses-proses yang dilakukan dalam operasi yang sebenarnya.

Dengan pendekatan ini dapat diperoleh informasi secara praktis mengenai :

- a. Bagaimana pelaksanaan kegiatan atau program yang sebenarnya
 - b. Langkah-langkah atau prosedur yang diperlukan dan gunanya untuk kegiatan atau program
 - c. Hasil-hasil yang telah dicapai
 - d. Efektivitas pengendalian manajemen
- (2) Menelaah buku pedoman atau manual dan kemungkinan mengujinya dengan pelaksanaan kegiatan atau program yang dipilih.
 - (3) Pendekatan tersebut juga dapat digunakan dengan cara memberikan *Internal Control Questionnaires* (ICO) kepada objek yang diperiksa sebelum pemeriksaan dilakukan.

3) Pemeriksaan Terperinci

Pekerjaan pemeriksaan terperinci dilakukan melalui kegiatan-kegiatan seperti menilai catatan dan berkas-berkas, mengecek dan menganalisis, melakukan verifikasi serta mengkonfirmasi dengan tujuan pemeriksaan juga kegiatan untuk memperoleh informasi melalui wawancara dan peninjauan fisik atau kontak langsung.

Pemeriksaan terperinci mencakup pemeriksaan terhadap :

- (1) Kegiatan dan transaksi keuangan (aspek-aspek keuangan).
Pemeriksaan lanjutan atas kegiatan transaksi keuangan bertujuan untuk :
 - a. Mendapatkan pengertian yang layak mengenai kegiatan atas program dari objek-objek yang diperiksa

- b. Mendapatkan prospektif yang cocok untuk dibandingkan dengan temuan-temuan yang diperoleh
- c. Mengenali masalah-masalah yang sifatnya menyeluruh baik yang sudah ada ataupun mungkin yang akan timbul untuk dipertimbangkan oleh pejabat-pejabat objek yang diperiksa dan pejabat-pejabat lain yang berkepentingan

(2) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

Kegiatan pemeriksaan yang efektif harus mencakup penelaahan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang berlaku untuk kegiatan atau program dari objek yang akan diperiksa.

Khusus mengenai kebijakan yang perlu dinilai adalah :

- a. Apakah kebijaksanaan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Apakah kebijaksanaan yang telah ditetapkan sudah efisien, efektif, dan ekonomis untuk dilaksanakan
- c. Apakah terjadi penyimpangan yang penting dan terus menerus atas kebijaksanaan yang telah ditentukan, apabila terjadi apakah terdapat alasan-alasan yang kuat

(3) Efisiensi kerja

Dalam hubungannya dengan pekerjaan pemeriksaan, efisiensi berarti pelaksanaan secara efektif tanpa pemborosan yang dirasa tidak perlu. Dalam pemeriksaan harus dinilai efisiensi operasional kegiatan atau program yang menggunakan tolak ukur yang ada pada proyek yang diperiksa dan secara langsung menilai kewajaran tolak ukur tersebut. Jika objek yang tidak mempunyai tolak ukur, maka kepala bidang merumuskan tolak ukur bersama-sama dengan objek yang lainnya.

(4) Pemanfaatan sumber daya dan dana

Pemanfaatan sumber daya dan dana diarahkan kepada efektivitas, efisiensi, dan kehematan sendiri maupun pihak lain yang ada dibawah pengelolaannya. Kegiatan-kegiatan seperti ini tidak dilakukan sebagai bagian pemeriksaan yang terpisah melainkan sudah tercakup dalam pemeriksaan operasional terhadap kegiatan atau program yang diperiksa. Tetapi untuk kegiatan-kegiatan yang besar perlu diadakan suatu program pemeriksaan yang terpisah untuk menilai aspek penggunaan sumber daya dan dana. Pemeriksaan harus peka untuk melihat praktek-praktek yang dilakukan secara boros, tidak layak atau pada umumnya tidak memuaskan dalam penggunaan sumber daya dan dana.

Patokan umum yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan terhadap penggunaan sumber daya dan dana ini diantaranya adalah :

- a. Sumber daya dan dana hanya dipakai untuk tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dan yang diperlukan saja
- b. Sumber daya dan dana dikelola secara layak dan efektif, digunakan secara efisien, dan ekonomis (tanpa pemborosan)

(5) Pencapaian tujuan yang ditetapkan

Pemeriksaan atas kegiatan atau program mempunyai tujuan untuk menilai apakah :

- a. Apakah objek yang diperiksa memang melaksanakan sesuai dengan yang yang telah ditetapkan
- b. Pelaksanaan secara efektif mengarah kepada tujuan yang telah ditetapkan

Dalam pemeriksaan ini kepala bidang memerlukan :

- a. Pengertian yang cukup lengkap mengenai tujuan yang ditetapkan dengan cara mempelajari latar belakang dan tujuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari kegiatan tersebut

- b. Pertimbangan yang seksama mengenai cara-cara yang efektif untuk mengukur keberhasilan usaha atas pencapaian tujuan, dengan menggunakan kriteria atau tolak ukur yang dipakai oleh objek-objek yang diperiksa

4) Temuan dan Pengembangan Temuan

(1) Temuan

- a. Setiap temuan terutama temuan negatif yang diperoleh dari hasil pemeriksaan harus dimanfaatkan atau dikembangkan untuk dijadikan dasar penyusunan laporan

- b. Sifat temuan

Temuan dapat berupa temuan yang positif dan temuan yang negatif, pada umumnya hanya temuan yang negatif yang memerlukan pengembangan lebih lanjut

- c. Syarat-syarat temuan dapat diteruskan :

- a) Dinilai penting untuk diteruskan kepada pihak-pihak lain
- b) Berdasarkan fakta dan bukti yang relevan dan kompeten
- c) Dikembangkan secara objektif
- d) Berdasarkan kepada pemeriksaan yang cukup memadai untuk mendukung sesuai kesimpulan yang diambil
- e) Harus dapat disimpulkan secara logis dan tegas

- d. Memperoleh dan menggunakan bukti

Bukti adalah informasi yang penting yang diperoleh selama pemeriksaan baik melalui pengamatan, wawancara, maupun catatan-catatan untuk mendukung temuan yang akan dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan diperlukan bukti yang cukup, relevan, dan kompeten.

Bukti tersebut antara lain dapat berupa :

- a) Bukti fisik
- b) Bukti kesaksian
- c) Bukti dokumentasi

- d) Bukti analisa
- e. Evaluasi keadaan

Agar dapat dilakukan evaluasi terhadap suatu keadaan diperlukan kriteria yang ditentukan secara objektif. Apabila kriteria yang akan dipakai untuk mengevaluasi keadaan yang sebenarnya terjadi, tidak dirumuskan secara objektif atau penafsiran kriteria oleh pemeriksa tidak tepat, sehingga menyulitkan pemeriksa dalam membandingkan keadaan yang sebenarnya dengan kriteria tersebut. Maka perlu diminta penjelasannya dan membicarakannya dengan objek yang diperiksa. Dengan membandingkan kriteria atau tolak ukur dengan keadaan yang sebenarnya terjadi, maka dapat ditentukan apabila adanya penyimpangan, pemborosan, dan penyalahgunaan

(2) Pengembangan temuan

a. Pengertian

- a) Pengembangan temuan adalah pengumpulan informasi khusus mengenai kegiatan atau program yang diperiksa, yang setelah dievaluasi dan dianalisis diperkirakan perlu mendapat perhatian dan berguna bagi pemakai laporan. Dengan pengembangan temuan tersebut dapat diketahui kondisi yang sebenarnya, penyimpangan yang terjadi, sebab akibat penyimpangan tersebut, serta merumuskan rekomendasi yang diperlukan
- b) Sifat, eksistensinya dan pentingnya temuan harus dinilai secara terus menerus selama proses untuk menentukan apakah masih dapat dibenarkan usaha untuk mengembangkan temuan tersebut sampai tuntas. Pengembangan suatu temuan dianggap cukup apabila telah diperoleh kejelasan kriteria (tolak ukur) penyebab, arti penting, pejabat yang bertanggungjawab, legalitas dan perbaikan yang diperlukan

b. Proses pengembangan temuan negatif (kekurangan atau kelemahan) mencakup :

- a) Identifikasi kekurangan atau kelemahan
- b) Menentukan jangkauan kekurangan atau kelemahan (apakah kekurangan atau kelemahan ini merupakan kasus yang berdiri sendiri atau tersebar luas)
- c) Menentukan sebab-sebab kekurangan atau kelemahan
- d) Menentukan akibat atau pengaruh kekurangan
- e) Rekomendasi sehubungan dengan koreksi terhadap kekurangan atau pencegahan berulangnya kekurangan tersebut. Dalam mengajukan rekomendasi supaya dapat ditunjukkan dengan jelas harus mencakup :

- (a) apa yang harus diperbaiki
- (b) sebab atau alasan mengapa perlu perbaikan
- (c) bagaimana cara memperbaikinya
- (d) menentukan langkah-langkah yang harus ditempuh

c. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan temuan

Untuk dapat membuat pertimbangan dan penarikan kesimpulan yang realistis, kepala bidang harus :

- a) Menguasai secara teknis pengembangan temuan secara objektif
- b) Menguasai sudut pandang yang realistis. Factor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan temuan adalah :
 - (a) Pertimbangan harus ditekankan pada situasi dan kondisi pada saat kejadian, bukan pada saat dilakukan pemeriksaan
 - (b) Harus dipertimbangkan kompleksitas, sifat dan besarnya jumlah serta nilai uang dari kegiatan atau program atau bagian-bagian yang sedang diperiksa
 - (c) Temuan perlu dianalisis untuk pengungkapan kelemahan secara tidak logis

(d) Pengembangan harus cukup teliti dan cukup luas, sehingga dapat dijadikan landasan untuk penarikan kesimpulan dan penyajian rekomendasi yang jelas dan tepat. Kepala bidang tidak boleh beranggapan bahwa pihak lain bersedia menerima kesimpulan dan saran hanya karena diungkapkan oleh petugas/aparat pengawasan

(e) Kewenangan hukum

perlu dikemukakannya dalam laporan untuk :

1. Kasus yang menyangkut tidak dilaksanakannya peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak sesuai dengan maksudnya
2. Bila menurut pertimbangan kepala bidang, perlu diadakan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Adanya pengeluaran-pengeluaran yang berlawanan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

d. Perbedaan pendapat

Dalam melaksanakan wewenangnya, mungkin ada keputusan keputusan pimpinan objek yang diperiksa yang tidak sesuai dengan pendapat kepala bidang. Keputusan tersebut seharusnya tidak disalahkan, tetapi harus diteliti lebih lanjut apakah keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan yang memadai sesuai dengan situasi dan kondisi. dengan demikian tidak boleh langsung menyalahkan hanya karena kepala bidang mempunyai pandangan yang berbeda mengenai keputusan pimpinan objek yang diperiksa. Dalam keadaan adanya perbedaan pendapat, kesimpulan dan rekomendasi harus didasarkan pada hasil atau pengaruh keputusan tersebut pada kegiatan atau program yang diperiksa

- e. Pada umumnya suatu temuan harus terus dikembangkan selama temuan tersebut ada artinya. Apabila temuan yang diperoleh tidak begitu mempunyai arti, maka pengembangan harus dihentikan dengan persetujuan penanggungjawab pemeriksa dan mengenai hal ini dapat dikemukakan dalam kertas kerja pemeriksa (KKP)
- f. Langkah-langkah yang harus diambil dalam pengembangan temuan. Apabila ditemukan kelemahan atau kekurangan yang penting dalam pelaksanaan kegiatan atau program yang diperiksa, kepala bidang harus menyusun rencana pengembangan semua aspek yang berhubungan dengan masalah tersebut secepat mungkin. Rencana tersebut harus dimasukkan dalam program kerja lanjutan. Proses pengembangan temuan negatif tersebut mencakup :
- a) Identifikasi kekurangan-kekurangan
Pada dasarnya pada suatu pemeriksaan, kepala bidang membandingkan sesuatu yang sebenarnya terjadi. Sebelumnya kepala bidang harus meyakini tentang kekayaan kriteria atau tolak ukur yang dipergunakan. Apabila dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan tidak dijumpai suatu kriteria, maka kepala bidang harus mengembangkan atau membuat tolak ukur bersama-sama dengan objek yang diperiksa
 - b) Identifikasi batas wewenang dan tanggungjawab pejabat yang terlibat dalam kegiatan kegiatan atau program yang diperiksa
Kepala bidang perlu mengenali pejabat yang bertanggungjawab terhadap kegiatan atau program yang diperiksa tersebut, dan juga mengenali tingkat dan tanggungjawab yang lebih tinggi, untuk mengetahui dengan siapa masalah yang bersangkutan akan dibahas dan kepada siapa laporan ditujukan, karena untuk pengendalian manajemen secara efektif terhadap operasional diperlukan pelimpahan-pelimpahan tanggungjawab yang tegas dengan yang cocok untuk melakukan tanggungjawab tersebut

sebagai bagian dari pemeriksaan, mungkin akan ditemukan bahwa kekurangan yang diidentifikasi disebabkan karena wewenang dan tanggungjawab tidak ditempatkan dengan jelas atau tidak dipahami dengan baik

c) Menentukan akibat-akibat atau arti pentingnya kekurangan

Kepala bidang harus mempertimbangkan dengan sepenuhnya akibat-akibat atau arti penting kekurangan dengan mengikuti cara pelaksanaan kegiatan atau program yang diperiksa tersebut. Kepala bidang tidak saja menaruh minat pada akibat-akibat langsung tetapi pada akibat sampingan dan akibat jangka panjang atau akibat lainnya baik yang nyata ataupun yang tersembunyi atau potensial. Perhatian kepala bidang terhadap suatu temuan tergantung dari penting atau tidaknya temuan tersebut dinilai dari segi akibatnya seperti kerugian secara finansial dan pengaruh negatif lainnya. Efisiensi, efektivitas, dan kehematan merupakan faktor yang berguna untuk mengukur akibat tersebut. Sehingga tindakan korektif atau perbaikan yang diperlukan atas dasar rekomendasi atau saran yang lebih disetujui benar-benar dilaksanakan. Kepala bidang harus mengikuti perkembangan tindakan-tindakan instansi yang bersangkutan dan apabila diperlukan juga melakukan pengujian selanjutnya mengenai masalah tersebut

d) Menentukan jangkauan kekurangan

Penentuan ini diperlukan untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat atas kekurangan atau kelemahan. Kesimpulan ini seringkali menjadi hal yang esensial untuk mendorong pimpinan objek yang diperiksa mengambil tindakan korektif. Apabila kepala bidang yakin bahwa kondisi itu tersebar luas atau besar akan terulang kembali, maka kepala bidang harus menyarankan objek yang diperiksa untuk memperbaiki kesalahan tersebut secepatnya

e) Menentukan sebab-sebab kekurangan atau kelemahan

Kepala bidang harus menyelidiki apa sebabnya terjadi keadaan yang merugikan dan apakah telah diadakan prosedur internal untuk menghindari hal yang merugikan tersebut, dan apakah prosedur internal itu ditetapkan secara selayaknya. Sebab-sebab kelemahan tersebut dapat bermacam-macam yang terpenting diantaranya adakah kelemahan dalam sistem manajemen karena apabila tidak mengalami koreksi maka akan terjadi kerugian yang lebih besar. Apabila kepala bidang mengetahui sebab-sebab kelemahan, maka :

- (a) Kepala bidang akan mengenali persoalan-persoalan lain yang memerlukan penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut
- (b) Kepala bidang akan lebih mudah mempertimbangkan rekomendasi bagaimana perkembangannya
- f) Identifikasi dan mencapai pemecahan tentang persoalan-persoalan hukum

Bagian penting dari kegiatan pemeriksaan adalah pengenalan dan penyelesaian terhadap persoalan-persoalan hukum yang akan dan mempengaruhi temuan-temuan serta saran-saran

5) Pembahasan Hasil Pemeriksaan Dengan Atasan atau Pejabat yang Diperiksa

- (1) Maksud dan tujuan pembahasan hasil pemeriksaan dengan objek yang diperiksa adalah untuk :
 - a. mempercepat penyusunan konsep laporan
 - b. mengurangi kemungkinan sanggahan terhadap laporan
 - c. lebih lengkap dan tepatnya konsep laporan
 - d. lebih cepat dilakukan tindakan korektif

(2) Cara :

- a. Pembahasan hasil pemeriksaan dilakukan oleh kepala bidang
- b. pembahasan dapat dilakukan dengan atasan atau pimpinan objek yang diperiksa, atau pejabat yang ditunjuknya, atau hanya dengan pejabat yang berhubungan dengan masalah bersangkutan
- c. pembahasan dilakukan selama pemeriksaan berlangsung dan atau setelah pemeriksaan selesai

6) Rekomendasi

(1) Pentingnya rekomendasi

Laporan yang mengandung rekomendasi akan mendorong perbaikan atau peningkatan mutu operasional dari kegiatan atau program yang diperiksa. Pada umumnya laporan diakhiri dengan rekomendasi sebagai koreksi atas kelemahan atau untuk pencegahan berulangnya kelemahan tersebut

(2) Pengujian rekomendasi

Fungsi kepala bidang adalah mengidentifikasi kelemahan yang memerlukan koreksi dan praktek-praktek yang dapat direkomendasikan. Adapun langkah-langkah perbaikannya merupakan tanggungjawab dari pimpinan objek yang diperiksa. Rekomendasi harus ditujukan kepada pimpinan objek yang mempunyai wewenang untuk memerintahkan dilakukannya perubahan kebijaksanaan

(3) Alternatif penyelesaian

Untuk beberapa permasalahan mungkin dapat ditemukan beberapa alternatif penyelesaian, kepala bidang harus mempertimbangkan pula besarnya biaya pelaksanaan suatu rekomendasi dibandingkan dengan manfaatnya

- (4) Hal-hal yang harus direkomendasikan
- a. Rekomendasi supaya didahului dengan informasi tentang keadaan yang perlu diperbaiki dan alasan mengapa perlu perbaikan
 - b. Dalam mengajukan rekomendasi yang konstruktif supaya dapat ditunjukkan secara jelas harus :
 - a) Apa yang harus diperbaiki
 - b) Sebab atau alasan mengapa perlu perbaikan
 - c) Bagaimana cara memperbaikinya
 - d) Langkah-langkah apa yang harus ditempuh
 - c. Dalam hal merekomendasikan tindakan yang segera, harus dijalankan konsekuensinya apabila terjadi penundaan tindakan
 - d. Dalam kasus-kasus yang ada kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang tidak ditaati harus merekomendasikan
 - a) Peraturan tersebut harus ditaati
 - b) Tindakan-tindakan yang perlu diambil agar peraturan tersebut dapat ditaati
- (5) Mengemukakan rekomendasi secara lisan
- Dalam beberapa kasus tertentu, rekomendasi secara lisan diperlukan agar dapat dilaksanakan tindakan korektif secara tepat dan menentukan
- (6) Syarat-syarat rekomendasi
- a. Harus mempertimbangkan antara manfaat dengan biaya (benefit cost ratio)
 - b. Harus dapat diukur oleh objek yang diperiksa
 - c. Harus jelas dan ringkas
 - d. Mempergunakan gaya bahasa yang mudah dicerna

4.1.2 Target Pendapatan Retribusi Daerah pada Pemerintah Kota Bandung Tahun 2005 Sampai dengan 2009

Dalam mengarahkan jalannya suatu pemerintahan menuju sasaran yang telah ditetapkan maka target sangat diperlukan oleh Pemerintah Kota Bandung sebagai tujuan yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Selain itu target berguna juga sebagai alat pengawasan atau pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pada masa yang akan datang, menjadikan sebagai tolak ukur untuk menilai realisasi kegiatan operasi Pemerintah Kota Bandung.

Pada Pemerintah Kota Bandung target pendapatan digunakan sebagai alat bantu utama bagi manajemen dalam menyusun rencana kerja usaha dalam keuangan serta dalam menilai prestasi para pegawai didukung dengan penyediaan anggaran. Memadai atau tidaknya suatu target pendapatan ditentukan oleh banyak hal diantaranya adalah dasar dan proses penyusunannya, kedua hal ini merupakan tugas yang sulit karena berhubungan dengan faktor-faktor yang berada diluar kendali manajemen organisasi.

Setelah target pendapatan disusun dan disahkan, maka anggaran pendapatan mulai dilaksanakan pada Pemerintah Kota Bandung sebagai pedoman yang memberikan batas-batas, hak-hak, dan tanggungjawab dalam pelaksanaan pekerjaan dalam bidangnya masing-masing. Adapun rincian target pendapatan retribusi daerah pada Pemerintah Kota Bandung dari tahun 2005 sampai dengan 2009 sebagai berikut :

- 1) Target pendapatan retribusi daerah tahun 2005 : Rp 63.643.298.000
- 2) Target pendapatan retribusi daerah tahun 2006 : Rp 74.527.551.000
- 3) Target pendapatan retribusi daerah tahun 2007 : Rp 84.491.655.813
- 4) Target pendapatan retribusi daerah tahun 2008 : Rp 104.999.443.429
- 5) Target pendapatan retribusi daerah tahun 2009 : Rp 102.074.223.130

4.1.3 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada Pemerintah Kota Bandung Tahun 2005 Sampai Dengan 2009

Laporan realisasi pendapatan retribusi daerah pertahun mencerminkan jumlah pendapatan retribusi meliputi : retribusi jasa usaha terminal (TPR), retribusi pelayanan kebersihan, retribusi parker di tepi jalan umum, retribusi jasa usaha tempat parkir khusus, retribusi izin trayek, retribusi SIPA, retribusi pengujian, retribusi dispensasi jalan dan angkutan hasil alam, serta retribusi bongkar muat yang benar-benar dimuat dalam satu tahun. Laporan realisasi disusun berdasarkan laporan pendapatan retribusi harian (daily report) dari semua jenis retribusi yang ada pada Pemerintah Kota Bandung.

Setelah laporan-laporan tersebut dibuat, maka dilaporkan perbandingannya antara target pendapatan retribusi yang disusun dalam proses perencanaan dengan pendapatan retribusi yang benar diterima oleh Pemerintah Kota Bandung. Perbandingan tersebut dilakukan baik setiap akhir bulan maupun akhir tahun yang berguna untuk menilai efektivitas pelaksanaan pendapatan retribusi daerah pada Pemerintah Kota Bandung, yaitu untuk mengetahui apakah target pendapatan retribusi daerah pada Pemerintah Kota Bandung dapat tercapai atau tidak.

Adapun perbandingan rincian target pendapatan retribusi yang disusun dalam proses perencanaan dengan pendapatan retribusi yang diterima oleh Pemerintah Kota Bandung dari tahun 2005 sampai dengan 2009 sebagai berikut :

Tahun	Target retribusi	Realisasi retribusi	Selisih retribusi
2005	63.643.298.000	65.873.568.195	2.230.270.190
2006	74.527.551.000	75.908.865.024	1.381.314.024
2007	84.491.655.813	66.150.795.925	18.340.859.888
2008	104.999.443.429	74.339.201.289	30.660.242.140
2009	102.074.223.130	77.170.447.766	24.903.775.364

4.2 Pembahasan

Atas dasar hasil penelitian tentang Fungsi Inspektorat Dalam Menunjang Peningkatan Pendapatan Retribusi Daerah Pada Pemerintah Kota Bandung, penulis melakukan pembahasan sebagai berikut :

4.2.1 Fungsi Inspektorat Pada Program Pemeriksaan

Inspektorat dalam melakukan tugasnya memiliki program pemeriksaan sebagai berikut :

- 1) Pembicaraan pendahuluan dengan pimpinan objek yang diperiksa
Inspektorat telah memberitahukan dan memberikan gambaran kepada Pimpinan objek yang diperiksa tentang pengertian, tujuan dan manfaat yang dapat diperoleh dari pemeriksaan yang dilakukan meliputi :
 - (1) Memberitahukan secara resmi akan diadakan pemeriksaan atas jumlah penerimaan retribusi daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kota Bandung, jumlah yang disetorkan sesuai dengan yang dilaporkan ke kas daerah, sudah sesuai dengan Peraturan Daerah
 - (2) Memberikan gambaran yang tepat pada Kepala Daerah atau pimpinan SKPD tentang manfaat yang dapat diperoleh yaitu sebagai tindakan koreksi atau perbaikan agar penyimpangan dapat dikurangi sebagai masukan untuk perbaikan kinerja
- 2) Pengujian terbatas terhadap sistem pengendalian manajemen
Inspektorat telah melakukan pengujian terbatas terhadap sistem pengendalian manajemen mulai dari kebijakan tentang peraturan dan program kerja dinas, serta perencanaan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada Pemerintah Kota Bandung meliputi :
 - (1) Menilai tingkat efisiensi dan efektivitas operasional Pemerintah Kota Bandung, dapat diketahui dengan dilakukannya penelusuran beberapa kegiatan oleh Inspektorat dari awal yaitu bagaimana pelaksanaan kegiatan atau program yang sebenarnya sampai akhir yaitu hasil yang dicapai sehubungan dengan maksud dan tujuan dari kegiatan atau program tersebut dengan jalan mengamati secara

langsung tindakan-tindakan, dan langkah-langkah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam operasi yang sebenarnya

- (2) Mengenali kemungkinan adanya kelemahan pengendalian manajemen, dengan cara menelaah buku pedoman atau manual dan kemudian mengujinya dengan pelaksanaan kegiatan atau program yang dipilih. Serta *internal control questionnaire (ICQ)* kepada Pemerintah Kota Bandung sebelum dilakukan pemeriksaan

3) Pemeriksaan terperinci

Pelaksanaan pemeriksaan ini dilakukan oleh Inspektorat dengan mengecek ketaatan atas peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang telah ditetapkan, menganalisis catatan-catatan transaksi keuangan dan berkas-berkas serta mengkonfirmasi dengan tujuan pemeriksaan dan diperoleh informasi melalui wawancara dan peninjauan fisik.

- (1) Pemeriksaan terhadap kegiatan dan transaksi keuangan

Dilaksanakan dengan cara membandingkan catatan-catatan seperti : buku kas penerimaan retribusi jasa usaha terminal, buku kas penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum dengan dokumen-dokumen transaksi keuangan seperti : Tanda Pembayaran Retribusi terminal (TPT), dan karcis di tepi jalan umum sehingga dapat diperoleh pengertian yang layak dari setiap kegiatan yang diperiksa untuk dipertimbangkan oleh kepala seksi bendaharawan penerima dan penyetor uang

- (2) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Dilaksanakan dengan memberikan penilaian atas kebijaksanaan yang berlaku bagi kegiatan yang ada pada Pemerintah Kota Bandung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diketahui apabila terjadi penyimpangan, misalnya : digunakannya dasar hukum Perda Nomor 14 Tahun 1986 pada pungutan retribusi pelayanan kebersihan (KK). Padahal Perda

Nomor 14 Tahun 1986 tidak mengatur tentang terminal angkutan penumpang, melainkan mengatur retribusi pasar

(3) Pemanfaatan sumber daya dan dana

Untuk dapat mengetahui sumber daya dan dana telah dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Inspektorat melaksanakan pemeriksaan operasional melalui kegiatan atau program yang diperiksa

(4) Pencapaian tujuan yang ditetapkan

Pemeriksaan dilaksanakan dengan menggunakan tolak ukur yaitu latar belakang dan tujuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari kegiatan yang dipakai oleh objek-objek yang diperiksa untuk mengukur keberhasilan usaha dan mengarahkan kepada tujuan yang telah ditetapkan

4) Temuan dan Pengembangan temuan

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat diharapkan dapat menemukan temuan-temuan baik itu temuan positif maupun temuan negatif yang kemudian dapat dijadikan dasar bagi penyusunan laporan dan dijadikan tolak ukur untuk evaluasi pada Pemerintah Kota Bandung dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun temuan-temuan yang diperoleh setelah dilaksanakan pemeriksaan harus didasarkan atas :

(1) Berdasarkan fakta dan bukti yang relevan

Untuk mendapatkan bukti yang relevan Inspektorat melakukan pemeriksaan dan diperoleh empat jenis bukti yaitu : bukti fisik, bukti kesaksian, bukti dokumentasi, dan bukti analisa

(2) Berdasarkan kepada pemeriksaan yang cukup memadai terdapat temuan-temuan

Adanya temuan-temuan tersebut yaitu :

Tabel 4.1
Realiasi retribusi yang ditargetkan
Anggarannya terlalu kecil pada tahun 2009

No	Jenis retribusi	2009		Selisih
		Anggaran	Realisasi	
1	Reribusi pelayanan kesehatan :			
	Dinas kesehatan kota	8.300.000.000	8.448.358.485	148.358.485
	Dinas kesehatan gigi	1.000.000.000	1.466.139.259	466.139.259
2	Retribusi kartu penduduk	3.439.877.500	4.620.308.000	1.180.430.500
3	Retribusi pel.pemakaman	975.000.000	1.046.675.000	71.675.000
4	Retibusi alat pemadam	250.000.000	366.857.000	116.857.000
5	Retribusi tempat rekreasi	136.270.000	623.758.000	487.488.000
6	Retribusi izin usaha industri	1.885.000.000	2.911.323.509	1.026.323.509
7	Retribusi SIUJK	65.000.000	269.516.382	204.516.382

Terdapat kesalahan penetapan target pendapatan retribusi pada tahun 2009 disebabkan karena penetapan target yang terlalu kecil sehingga realisasi anggarannya lebih besar dari target yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini Inspektorat untuk membantu Pemerintah Kota Bandung dalam meningkatkan pendapatan retribusi daerah yaitu dengan cara memberikan saran kepada Pemerintah Kota Bandung diantaranya dalam menentukan target pendapatan retribusi, kenaikannya tidak terlalu besar dan disesuaikan dengan realisasi pendapatan retribusi tahun sebelumnya serta administrasi keuangan lebih diperketat. Jadi disini terlihat bahwa Inspektorat memberikan bantuan kepada Pemerintah Kota Bandung dalam menunjang peningkatan pendapatan retribusi yaitu dalam memberikan saran-saran yang dikemukakan, sehingga dapat dikatakan bahwa Inspektorat berfungsi dan membantu dalam menunjang peningkatan pendapatan retribusi daerah pada Pemerintah Kota Bandung.

Untuk mengatasi hal-hal seperti itu maka tindakan koreksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam menetapkan target retribusi, yaitu

target pendapatan retribusi yang ditetapkan kenaikannya tidak terlalu besar dan dengan dilaksanakannya tindakan koreksi oleh Pemerintah Kota Bandung maka kemungkinan besar persentase peningkatan pendapatan retribusi untuk tahun yang akan datang dapat tercapai.

Tabel 4.2
Realisasi retribusi yang tidak mencapai
Target yang dianggarkan pada tahun 2009

No	Jenis retribusi	2009		Selisih
		Anggaran	Realisasi	
1	Reribusi pelayanan kesehatan :			
	RSB. Astana anyar	6.100.000.000	4.137.815.950	1.962.184.050
	RS Umum daerah Kota Bandung	14.500.000.000	10.567.469.551	3.932.530.449
2	Retribusi pelayanan sampah	50.730.000	42.405.000	8.325.000
3	Retribusi parkir ditepi jalan umum	5.999.986.150	4.503.200.000	1.496.780.150
4	Retribusi bidang perhubungan	4.993.700.000	4.885.185.300	108.514.700
5	Retribusi kekayaan daerah	130.000.000.000	46.669.500	83.330.500
6	Retribusi sewa tanah/bangunan	8.500.000.000	7.317.905.915	1.182.094.085
7	Retribusi jasa usaha terminal	8.230.772.500	7.208.280.200	1.022.492.300
8	Retribusi jasa usaha	485.000.000	35.698.000	449.302.000
9	Retribusi izin mendirikan bangunan	12.500.000.000	9.342.291.067	3.157.708.933
10	Retribusi izin gangguan	3.300.000.000	2.649.614.533	650.385.467
11	Retribusi penggunaan tanah	10.000.000.000	2.557.002.078	7.442.997.922
12	Retribusi rumah potong hewan	1.569.870.000	563.627.750	1.006.242.250
13	Retribusi pengairan	271.554.000	55.310.100	216.243.900

Dalam penetapan target anggaran retribusi daerah yang akan dicapai pada tahun 2009 terdapat kesalahan dalam penentuan target, sehingga target yang direncanakan tidak tercapai dan realisasinya lebih sedikit jumlahnya dari yang dianggarkan atau yang ditargetkan. Hal tersebut dapat disebabkan karena dalam menentukan target retribusi daerah tidak berdasarkan hasil kajian sehingga targetnya ada yang terlalu rendah, selain itu retribusi yang tidak mencapai target yang dianggarkan dapat juga disebabkan karena dalam menentukan target retribusi tidak berdasarkan potensi yang ada tetapi berdasarkan prediksi atau perkiraan sehingga menyebabkan target tidak tercapai.

- 5) Pembahasan hasil pemeriksaan dengan atasan atau pejabat yang diperiksa Selama pemeriksaan dan setelah pemeriksaan dilaksanakan tim pemeriksa atau penanggungjawab dari Inspektorat melakukan pembahasan dari hasil pemeriksaan dengan atasan atau pimpinan objek yang diperiksa atau pejabat yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan pada Pemerintah Kota Bandung. Pembahasan ini dilakukan untuk mempercepat proses penyusunan konsep laporan, mengurangi kemungkinan sanggahan atas laporan, lebih lengkap dan tepatnya laporan dan mempercepat dilakukannya tindakan koreksi apabila ada yang perlu dikoreksi.

4.2.2 Fungsi Inspektorat Dalam Menunjang Peningkatan Retribusi Daerah pada Pemerintah Kota Bandung

Target retribusi daerah pada Pemerintah Kota Bandung dari tahun 2005 sampai tahun 2009 terus mengalami peningkatan dan realisasi retribusi daerah pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 telah memenuhi targetnya. Hal ini dapat dilihat pada data sebagai berikut :

Tabel 4.3
Target retribusi dan realisasinya

Tahun	Target retribusi	Realisasi retribusi	Selisih retribusi
2005	63.643.298.000	65.873.568.195	2.230.270.190
2006	74.527.551.000	75.908.865.024	1.381.314.024
2007	84.491.655.813	66.150.795.925	18.340.859.888
2008	104.999.443.429	74.339.201.289	30.660.242.140
2009	102.074.223.130	77.170.447.766	24.903.775.364

Temuan dan saran-saran yang dihasilkan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat dan diterapkan pada Pemerintah Kota Bandung terutama temuan negatif diantaranya adalah penetapan target penerimaan retribusi daerah terlalu besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang kemudian Inspektorat membantu dengan memberikan saran kepada Pemerintah Kota Bandung agar dalam menentukan target penerimaan retribusi kenaikannya tidak terlalu besar disesuaikan dengan realisasi penerimaan retribusi tahun sebelumnya. Adapun hal-hal yang mencerminkan aktivitas Inspektorat dalam hal peningkatan retribusi daerah pada Pemerintah Kota Bandung adalah sebagai berikut :

- 1) Inspektorat melaporkan langsung hasil kerjanya kepada Walikota melalui Sekertaris Daerah yang berisi seluruh informasi dari objek yang diperiksa tentang suatu realisasi kegiatan termasuk di dalamnya menginformasikan temuan baik yang bersifat positif maupun temuan yang bersifat negatif. Dalam hal ini menunjukkan independensi dari Inspektorat.
- 2) Telah terdapat pedoman pelaksanaan pemeriksaan yang dinamakan pedoman pelaksanaan pemeriksaan regular yang dikeluarkan Inspektorat Jenderal yang memuat ketentuan dan prosedur dalam setiap pelaksanaan pemeriksaan.
- 3) Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan yang terdiri dari rancangan kerja pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, pembuatan laporan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan terus menerus.

- 4) Inspektorat telah melakukan penilaian terhadap keefektifan dan pelaksanaan sistem pengendalian intern yang telah diciptakan untuk menjamin bahwa data-data keuangan dapat dipercaya dan kekayaan pemerintah daerah telah diawasi dengan baik.
- 5) Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat dilakukan sesuai dengan prosedur-prosedur mulai dari dilakukannya perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan sehingga kinerja Inspektorat dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan terdapatnya hal-hal diatas, membuktikan bahwa Inspektorat mempunyai fungsi yang penting bagi Pemerintah Kota Bandung sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang dapat meningkatkan penerimaan retribusi daerah dan meminimalkan resiko yang mungkin akan terjadi dimasa yang akan datang. Jadi disini terlihat bahwa Inspektorat memberikan bantuan kepada Pemerintah Kota Bandung dalam menunjang peningkatan retribusi daerah yaitu memberikan saran-saran yang bermanfaat, sehingga dapat dikatakan bahwa Inspektorat berfungsi dan membantu dalam menunjang peningkatan retribusi daerah pada Pemerintah Kota Bandung.

4.2.3 Pendapatan Retribusi Pemerintah Kota Bandung

Tabel 4.4
Realisasi retribusi daerah pada Pemerintah Kota Bandung
Tahun 2005 sampai dengan 2009

Keterangan	2005	2006	2007	2008	2009
Anggaran	63.643.298.000	74.527.551.000	84.491.655.813	104.999.443.429	102.074.223.130
Retribusi	65.873.568.195	75.908.865.024	66.150.795.925	74.339.201.289	77.170.447.766
selisih	2.230.270.190	1.381.314.024	18.340.859.888	30.660.242.140	24.903.775.364

Dilihat dari realisasi retribusi Pemerintah Kota Bandung, bahwa terjadi peningkatan yang diakibatkan oleh fungsi Inspektorat pada tahun 2005 ke tahun 2006 mengalami kenaikan dengan selisih sebesar Rp 10.035.296.829, dari tahun

2006 ke tahun 2007 mengalami penurunan dengan selisih sebesar Rp 9.758.069.100, dari tahun 2007 ke tahun 2008 mengalami kenaikan dengan selisih sebesar Rp 8.188.405.360, dari tahun 2008 ke tahun 2009 mengalami kenaikan dengan selisih sebesar Rp 2.831.246.480.

Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa realisasi retribusi pada Pemerintah Kota Bandung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun kecuali pada tahun 2007 mengalami penurunan disebabkan karena penetapan target realisasi retribusi yang terlalu besar dan dalam menentukan target realisasi retribusi tidak berdasarkan potensi yang ada tetapi berdasarkan prediksi atau perkiraan, sehingga hal tersebut berdampak pada penurunan perolehan retribusi pada Pemerintah Kota Bandung.

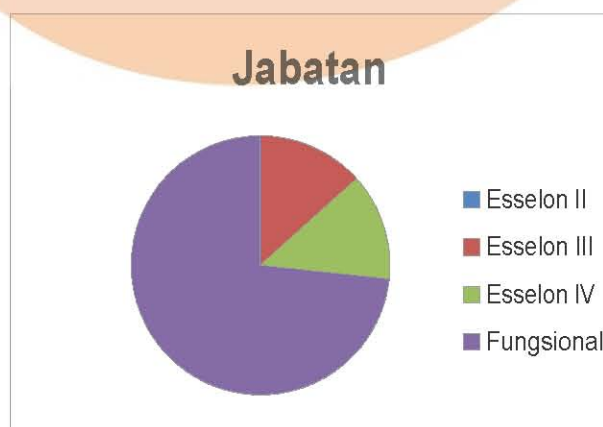
4.2.3.1 Analisis Data

4.2.3.2 Gambaran Umum Responden

1) Berdasarkan Jabatan

Dari hasil penelitian yang dilakukan dari 30 responden yang menjadi objek penelitian, maka diperoleh komposisi berdasarkan jabatan responden yaitu terdapat Esselon II 0 orang (0%) Esselon III sebanyak 4 orang (13%), esselon IV sebanyak 4 orang (13%), dan fungsional sebanyak 22 orang (73%) dari total responden. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Tabel 4.5
Berdasarkan Jabatan



2) Berdasarkan tingkat pendidikan

Dari hasil penelitian yang dilakukan dari 30 responden yang menjadi objek penelitian, maka diperoleh komposisi berdasarkan tingkat pendidikan responden yaitu terdapat Esselon II 0 orang (0%) Esselon III sebanyak 4 orang (13%), esselon IV sebanyak 4 orang (13%), dan fungsional sebanyak 22 orang (73%) dari total responden. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

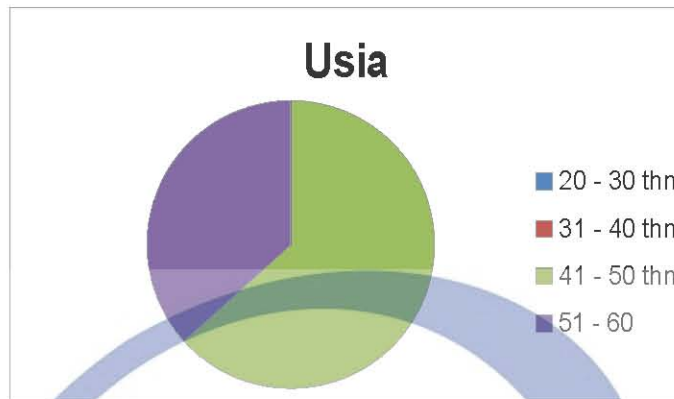
Tabel 4.6
Berdasarkan Tingkat Pendidikan



3) Berdasarkan usia responden

Dari hasil penelitian yang dilakukan dari 30 responden yang menjadi objek penelitian, maka diperoleh komposisi berdasarkan usia responden yaitu usia 20 – 30 thn sebanyak 0 (0%), usia 31 – 40 thn sebanyak 0 orang (0%), usia 41 – 50 thn sebanyak 19 orang (63%), dan usia 51 – 60 tahunl sebanyak 11 orang (37%) dari total responden. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Tabel 4.7
Berdasarkan usia responden



4.2.3.3 Fungsi Inspektorat

Berdasarkan uraian teori dari hasil penelitian yang dikemukakan oleh penulis, khususnya mengenai fungsi Inspektorat dalam menunjang peningkatan retribusi daerah pada Pemerintah Kota Bandung, penulis memberikan beberapa analisis atas penelitian tersebut.

Untuk mengetahui seberapa besar fungsi Inspektorat dalam menunjang peningkatan pendapatan retribusi daerah pada Pemerintah Kota Bandung, penulis melakukan perhitungan hasil kuisioner dengan responden sebanyak 30 orang dan pertanyaan kuisioner sebanyak 10 buah untuk variabel X bagian fungsi Inspektorat kemudian dibandingkan dengan kriteria penilaian yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan nilai terendah dan nilai tertinggi dari hasil kuisioner. Untuk mengetahui hasil penilaian dan perhitungan terhadap variabel X dapat dilihat pada table 4.8

Tabel 4.8

Hasil Penilaian dan Perhitungan Skor Kuisioner Variabel X

Responden	Pertanyaan										Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	5	5	4	4	5	4	5	4	5	5	46
2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
3	4	5	5	5	4	5	5	4	5	4	46
4	5	4	5	5	4	4	5	5	4	5	46
5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	49
6	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	49
7	5	5	4	4	5	5	5	5	4	5	47
8	5	5	4	4	5	5	4	5	5	5	47
9	4	5	4	4	5	3	5	5	5	5	45
10	4	4	5	4	5	3	4	5	4	5	43
11	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	41
12	5	5	4	3	5	5	5	5	5	5	47
13	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	49
14	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	48
15	4	5	4	4	5	4	5	3	5	5	44
16	5	5	5	5	4	5	4	4	5	5	47
17	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	49
18	4	5	5	4	5	4	4	4	4	4	43
19	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5	47
20	5	5	4	5	4	5	5	4	5	5	47
21	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	48
22	5	5	5	3	5	4	5	5	5	5	47
23	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
24	5	5	4	5	5	4	4	5	5	5	47
25	4	5	5	3	5	4	5	5	5	5	46
26	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	49
27	4	4	5	5	4	5	4	5	5	5	46
28	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	42
29	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	49
30	5	5	4	3	4	4	4	5	5	5	44
Jumlah											1398

Hasil skor tersebut kemudian dibagi dengan skor ideal : $5 \times 30 \times 10 =$

$$1500 \text{ sehingga diperoleh persentase : } \frac{1398}{1500} \times 100\% = 93,20\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas skor dari variabel X adalah sebesar 93,20% apabila dibandingkan dengan kriteria yang telah penulis tetapkan, skor tersebut masuk dalam kriteria “84% - 100%” yang menjelaskan bahwa Inspektorat sangat memadai dalam menentukan penyelenggaraan pemerintah di bidang pengawasan.

4.2.3.4 Pendapatan Retribusi Pemerintah Kota Bandung

Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan terhadap pendapatan retribusi pada Pemerintah Kota Bandung, penulis melakukan perhitungan hasil kuisioner dengan responden sebanyak 30 orang dan pertanyaan kuisioner sebanyak 10 buah untuk variabel Y pada Inspektorat, kemudian hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan kriteria yang telah ditentukan oleh penulis sebelumnya berdasarkan nilai terendah dan nilai tertinggi dari hasil penelitian kuisioner. Untuk mengetahui hasil penelitian dan perhitungan terhadap variabel Y dapat dilihat pada tabel 4.9

Tabel 4.9
Hasil Penilaian dan Perhitungan Skor Kuisioner Variabel Y

Responden	Pertanyaan										Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	48
2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
3	5	4	5	5	4	5	4	5	5	4	46
4	5	5	4	4	5	5	4	5	4	5	46
5	5	5	5	5	3	5	4	5	5	5	47
6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
7	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	48
8	5	5	5	4	5	3	5	4	5	5	46
9	5	5	3	4	4	3	3	5	5	5	42
10	4	5	3	3	4	3	2	5	5	5	39
11	4	4	4	4	4	3	2	4	4	4	37
12	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	48
13	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
14	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	47
15	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	48
16	5	5	5	5	3	5	4	5	5	5	47
17	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	49
18	4	5	5	5	4	5	4	4	5	4	45

19	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	49
20	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	49
21	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	49
22	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	48
23	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	48
24	5	5	5	5	4	5	4	5	4	5	47
25	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	48
26	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	49
27	4	5	3	5	5	5	5	5	5	5	47
28	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	49
29	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
30	5	5	5	4	5	5	4	4	5	5	47
Jumlah											1413

Hasil skor tersebut kemudian dibagi dengan skor ideal : $5 \times 30 \times 10 = 1500$ sehingga diperoleh persentase : $\frac{1413}{1500} \times 100\% = 94,20\%$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas skor dari variabel Y adalah sebesar 94,20% apabila dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh penulis, skor tersebut masuk kedalam kriteria “84% - 100%” yang menjelaskan bahwa pendapatan retribusi daerah pada Pemerintah Kota Bandung sangat memadai.

4.2.3.5 Hasil Pengujian Hipotesis

Dalam pengujian hipotesis yang menggunakan koefisien korelasi *Rank Spearman* dibutuhkan suatu tabel yang berguna untuk membantu menghitung koefisien korelasi tersebut. Tabel yang digunakan merupakan peringkat atau rangking yang disusun berdasarkan hasil dari jawaban setiap responden yang diurutkan dari nilai jawaban yangh paling besar ke nilai jawaban yang paling kecil. Untuk mengetahui hasil peringkat atau rangking dari setiap jawaban responden dapat dilihat pada tabel 4.10

Tabel 4.10

Rangking Hasil Penilaian dan Perhitungan Skor Kuisisioner

Responden	Xi	Yi	Rank Xi	Rank Yi	bi	bi²
1	46	48	21	14	7	49
2	50	50	1,5	2,5	-1	1
3	46	46	21	25	-4	16
4	46	46	21	25	-4	16
5	49	47	5,5	20,5	-15	225
6	49	50	5,5	2,5	3	9
7	47	48	14,5	14	0,5	0,25
8	47	46	14,5	25	-10,5	110,25
9	45	42	24	28	-4	16
10	43	39	27,5	29	-1,5	2,25
11	41	37	30	30	0	0
12	47	48	14,5	14	0,5	0,25
13	49	50	5,5	2,5	3	9
14	48	47	9,5	20,5	-11	121
15	44	48	25,5	14	11,5	132,25
16	47	47	14,5	20,5	-6	36
17	49	49	5,5	7,5	-2	4
18	43	45	27,5	27	0,5	0,25
19	47	49	14,5	7,5	7	49
20	47	49	14,5	7,5	7	49
21	48	49	9,5	7,5	2	4
22	47	48	14,5	14	0,5	0,25
23	50	48	1,5	14	-12,5	156,25
24	47	47	14,5	20,5	-6	36
25	46	48	21	14	7	49
26	49	49	5,5	7,5	-2	4
27	46	47	21	20,5	0,5	0,25
28	42	49	29	7,5	21,5	462,25
29	49	50	5,5	2,5	3	9
30	44	47	25,5	20,5	5	25
Jumlah						1591,5

Keterangan :

Pada variabel X terdapat beberapa skor yang sama, maka untuk mencari rangkingnya digunakan cara sebagai berikut :

- Untuk skor 50 seharusnya rangking 1 dan 2, menjadi ranking :

$$\frac{1+2}{2} = 1,5$$

- Untuk skor 49 seharusnya rangking 3, 4, 5, 6, 7, 8, menjadi rangking :

$$\frac{3+4+5+6+7+8}{6} = 5,5$$

- Untuk skor 48 seharusnya rangking 9, 10, menjadi rangking :

$$\frac{9+10}{2} = 9,5$$

- Untuk skor 47 seharusnya rangking 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 menjadi rangking :

$$\frac{11+12+13+14+15+16+17+18}{8} = 14,5$$

- Untuk skor 46 seharusnya rangking 19, 20, 21, 22, 23 menjadi rangking :

$$\frac{19+20+21+22+23}{5} = 21$$

- Untuk skor 45 rangkingnya 24

- Untuk skor 44 seharusnya rangking 25, 26, menjadi rangking :

$$\frac{25+26}{2} = 25,5$$

- Untuk skor 43 seharusnya rangking 27, 28, menjadi rangking :

$$\frac{27+28}{2} = 27,5$$

- Untuk skor 42 rangkingnya 29

- Untuk skor 41 rangkingnya 30

Pada variabel Y terdapat beberapa skor yang sama, maka untuk mencari rangkingnya digunakan cara sebagai berikut :

- Untuk skor 50 seharusnya rangking 1, 2, 3, 4, menjadi rangking :

$$\frac{1+2+3+4}{4} = 2,5$$

- Untuk skor 49 seharusnya rangking 5, 6, 7, 8, 9, 10, menjadi rangking :

$$\frac{5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10}{6} = 7,5$$

- Untuk skor 48 seharusnya rangking 11,12,13,14,15,16,17, menjadi rangking :

$$\frac{11+12+13+14+15+16+17}{7} = 14$$

- Untuk skor 47 seharusnya rangking 18, 19, 20, 21, 22, 23, menjadi rangking :

$$\frac{18+19+20+21+22+23}{6} = 20,5$$

- Untuk skor 46 seharusnya rangking 24, 25, 26, menjadi rangking :

$$\frac{24+25+26}{3} = 25$$

- Untuk skor 45 rangkingnya 27
- Untuk skor 42 rangkingnya 28
- Untuk skor 39 rangkingnya 29
- Untuk skor 37 rangkingnya 30

Berdasarkan data pada tabel 4.10 maka dapat diketahui koefisien korelasi

Rank Spearman dengan memasukan data tersebut kedalam rumus :

$$P = 1 - \frac{6 \sum bi^2}{n(n^2 - 1)}$$

$$P = 1 - \frac{6 (1591,5)}{30 (30^2 - 1)}$$

$$P = 1 - \frac{9549}{26970}$$

$$P = 1 - 0,354$$

$$P = 0,646$$

Dari hasil perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa untuk $n = 30$ dengan tingkat signifikansi 5% pada tabel rho, nilai P_{hitung} lebih besar dari nilai P_{tabel} yaitu $0,646 > 0,506$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis yang penulis ajukan dapat diterima (H_0 ditolak dan H_a diterima), artinya Fungsi Inspektorat dapat Meningkatkan Retribusi Daerah Pada Pemerintah Kota Bandung.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis pada Inspektorat Kota Bandung dan Pemerintah Kota Bandung dapat diambil kesimpulan bahwa :

- 1) Pelaksanaan pengawasan daerah atas pendapatan retribusi yang dilaksanakan pada Pemerintah Kota Bandung telah berfungsi, hal tersebut dapat dilihat dari dilaksanakannya beberapa faktor pada saat pemeriksaan, yaitu :
 - (1) Pembicaraan pendahuluan dengan pimpinan objek yang diperiksa
 - (2) Pengujian terbatas terhadap system pengendalian manajemen
 - (3) Pemeriksaan terperinci
 - (4) Temuan dan pengembangan temuan
 - (5) Pembahasan hasil pemeriksaan dengan atasan atau pejabat yang diperiksa

- 2) Fungsi Inspektorat Kota Bandung adalah membantu Walikota dalam hal pengawasan untuk menentukan kebijakan dalam berbagai situasi seperti terjadinya pemborosan, ketidakefektifan, ketidakefisiensian. Inspektorat mengajukan rekomendasi dan perbaikan yang diperlukan oleh pimpinan atau kepala dinas atas kelemahan-kelemahan tersebut. Tujuannya adalah untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah pada Pemerintah Kota Bandung.

- 3) Tercapainya tujuan peningkatan pendapatan retribusi daerah pada Pemerintah Kota Bandung yang didukung berdasarkan faktor-faktor yang mendukung yaitu :

Tahun	Target retribusi	Realisasi retribusi	Selisih retribusi
2005	63.643.298.000	65.873.568.195	2.230.270.190
2006	74.527.551.000	75.908.865.024	1.381.314.024
2007	84.491.655.813	66.150.795.925	18.340.859.888
2008	104.999.443.429	74.339.201.289	30.660.242.140
2009	102.074.223.130	77.170.447.766	24.903.775.364

Perbandingan antara penetapan target pendapatan retribusi daerah dengan realisasi pendapatan retribusi daerah pada Pemerintah Kota Bandung untuk tahun 2006 terjadi peningkatan dari tahun 2005, pada tahun 2007 terjadi penurunan dari tahun 2006 hal ini disebabkan karena terlalu tingginya penetapan target pendapatan retribusi daerah dan dapat juga disebabkan karena dalam menentukan target retribusi tidak berdasarkan potensi yang ada tetapi berdasarkan prediksi atau perkiraan sehingga menyebabkan target tidak tercapai, pada tahun 2008 terjadi peningkatan dari tahun 2007, dan pada tahun 2009 terjadi peningkatan dari tahun 2008.

5.2 Saran-saran

- 1) Inspektorat Kota Bandung sangat berfungsi dalam menunjang peningkatan pendapatan retribusi daerah pada Pemerintah Kota Bandung, oleh karena itu sebaiknya Inspektorat Kota Bandung perlu lebih meningkatkan profesionalitasnya dalam pengawasan pada Pemerintah Kota Bandung.
- 2) Pemerintah Kota Bandung dalam menentukan target pendapatan retribusi daerah sebaiknya lebih mempertimbangkan aspek realistis yang akan dicapai sehingga tujuan realisasi pendapatan retribusi daerah akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Baswir, Revrison. 2000. **Akuntansi Pemerintahan Indonesia**. BPFE : Yogyakarta

Hendriksen, Eldon ;dan Michael F. Van Breda yang dialihbahasakan oleh Herman Wibowo. 2002. **Teori Akuntansi**. Salemba Empat : Jakarta

Ikatan Akuntansi Indonesia 2007. **Standar Akuntansi Keuangan**. Salemba Empat : Jakarta

Kaho, Joseph Riwu. 2005. **Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia**. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta

Hiro Tugiman, 1997, **Standar Profesional Audit Internal**, Cetakan Pertama, Penerbit Konisius, Yogyakarta

Marihot P Siahaan, 2005, **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**, Edisi Pertama, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Peraturan Perundangan :

Undang-undang RI No.28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peaturan Menteri Dalam Negri NO. 23 Tahun 2007. **Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**. Jakarta : CV. Novindo Pustaka Mandiri

Inspektorat Jendral, 1997, **Pedoman Reguler Aparat Pengawas Fungsional di Jajaran Departemen Dalam Negri**, Jakarta

Inspektorat Bag. Hukum. Keuangan Daerah Kota Bandung Sebagai Daerah Otonom Pembentukan da Susunan Organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung

Undang-Undang RI No.33 Tahun 2004, tentang **Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah**

Website :

[Id.wikipedia.org](https://id.wikipedia.org)

www.google.com



This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

